

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Mendukung SDGs 2 di Kabupaten Lombok Timur

Deliyana Wika Kinanti^{1*}, Agus Riswanto², Muhamad Ali³
^{1,2,3}Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : deliyanawika@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 08 Agustus, 2026

Page: 4442-4453

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3614>

Article History:

Received: Juni 02, 2026

Revised: Juli 23, 2026

Accepted: Agustus 17, 2026

Abstract : *The Free Nutritious Meals Programme (MBG) is a national policy supporting Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) through stronger food and nutritional security. This study analyses MBG implementation in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, focusing on local food supply-chain management. A descriptive qualitative approach used in-depth interviews with 16 informants comprising managers of Nutrition Fulfilment Service Units (SPPG), kitchen partners, suppliers, and beneficiaries. Findings show that SPPG operates under structured standard operating procedures, produces up to 2,622 portions daily, and distributes meals punctually to schools and health posts. However, supplier partnerships remain dualistic, combining formal and informal arrangements and creating institutional vulnerability. Beneficiaries reported improved health, enthusiasm for learning, and reduced household food expenditure. The study concludes that stronger partnership contracts, supply-chain institutions, and involvement of local micro, small, and medium enterprises are required to ensure sustainability and inclusiveness of the MBG programme.*

Keywords : *Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Local Food Supply Chain, SDGs Goal 2, Policy Implementation, East Lombok*

Abstrak : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-2 melalui penguatan ketahanan pangan dan gizi. Penelitian ini menganalisis implementasi MBG di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada pengelolaan rantai pasok pangan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan yang terdiri atas pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra dapur, pemasok lokal, serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG telah beroperasi dengan SOP terstruktur, kapasitas produksi mencapai 2.622 porsi per hari, dan distribusi berlangsung tepat waktu ke sekolah serta posyandu. Namun, pola kemitraan pemasok masih bersifat dualistik, yaitu formal dan informal, sehingga menimbulkan kerentanan kelembagaan. Penerima manfaat melaporkan peningkatan kesehatan, semangat belajar, dan pengurangan pengeluaran pangan keluarga. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kontrak kemitraan, kelembagaan rantai pasok, dan keterlibatan UMKM lokal

diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas program MBG.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rantai Pasok Pangan Lokal, SDGs Tujuan 2, Implementasi Kebijakan, Lombok Timur

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan isu strategis pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan. Di Indonesia, permasalahan kelaparan dan gizi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan tata kelola kebijakan, distribusi pangan, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber pangan lokal secara berkelanjutan. Studi nasional menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan publik serta keterlibatan aktor lokal dalam sistem pangan (Rahakbauw, 2025).

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan. Program MBG diposisikan sebagai intervensi strategis untuk memperbaiki kualitas gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, beberapa kajian nasional menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi sangat ditentukan oleh kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan, termasuk koordinasi antaraktor dan keberlanjutan penyediaan bahan pangan bergizi (Syamsu *et al.*, 2025). Di Indonesia, implementasi Tujuan 2 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui penguatan ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Secara konseptual, ketahanan pangan mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas, sebagaimana ditegaskan oleh Food and Agriculture Organization (U. Nations, 2026).

Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program MBG mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025 di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Program MBG merupakan salah satu realisasi dari janji kampanye pasangan Prabowo–Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045 (K. S. N. R. Indonesia, 2025).

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan dukungan kelembagaan dan regulasi untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan secara efektif. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sasaran utama pemenuhan gizi meliputi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program ini. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp71 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat. Program ini bahkan ditargetkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga menjadi salah satu program intervensi gizi terbesar di Indonesia. Pelaksanaan program MBG juga melibatkan berbagai unit operasional yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat di berbagai daerah. Pada tahap awal implementasi, program ini telah dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia dengan ratusan dapur layanan yang beroperasi secara bertahap (M. P. R. R. Indonesia, 2025).

Implementasi kebijakan, efektivitas MBG sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusional serta koordinasi lintas sektor (Suprpto *et al.*, 2025) melakukan evaluasi implementasi program MBG dari sudut pandang kebijakan, yang menyoroti pentingnya kapasitas birokrasi, kepemimpinan lokal, serta mekanisme tata kelola yang transparan untuk mencapai tujuan program secara optimal. Keberhasilan implementasi ini juga berkaitan dengan bagaimana program tersebut terintegrasi secara efektif dengan sistem pangan lokal, termasuk dalam hal desain distribusi, penyediaan bahan baku, dan pengawasan kualitas pangan, di mana literatur menunjukkan bahwa keterlibatan rantai pasok pangan lokal dapat meningkatkan keberlanjutan pasokan serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Program MBG dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi dasar kelompok rentan, khususnya siswa sekolah, melalui penyediaan makanan yang seimbang secara gizi dalam lingkungan pendidikan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan MBG memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan pangan anak, meningkatkan kualitas belajar, serta menurunkan risiko stunting dan masalah kesehatan lainnya di tingkat anak sekolah (Agustini & Mulyani, 2025). Program MBG diposisikan sebagai intervensi strategis untuk memperbaiki kualitas gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, beberapa kajian nasional menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi sangat ditentukan oleh kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan, termasuk koordinasi antaraktor dan keberlanjutan penyediaan bahan pangan bergizi (Syamsu *et al.*, 2025). Dengan demikian, MBG perlu dikaji tidak hanya dari sisi tujuan kebijakan, tetapi juga dari proses implementasinya di tingkat daerah.

Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan status gizi anak, memperbaiki konsentrasi belajar, serta mendorong sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiani *et al.*, 2026) menemukan bahwa *Free Nutritious Meal Program* memberikan dampak positif signifikan terhadap status gizi anak dan hasil belajar siswa melalui desain menu yang sesuai kebutuhan gizi, keterlibatan komunitas lokal, serta sistem monitoring berbasis data yang kuat. Di Indonesia, permasalahan kelaparan dan gizi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan tata kelola kebijakan, distribusi pangan, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber pangan lokal secara berkelanjutan. Studi nasional menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan publik serta keterlibatan aktor lokal dalam sistem pangan (Rahakbauw, 2025).

Salah satu aspek penting dalam implementasi Program MBG adalah pengelolaan rantai pasok pangan lokal. Rantai pasok pangan lokal tidak hanya berperan dalam menjamin ketersediaan bahan makanan, tetapi juga mencerminkan hubungan antara petani, pelaku UMKM pangan, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana program. Penelitian nasional menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan lokal dalam program pangan pemerintah berpotensi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, apabila didukung oleh tata kelola dan koordinasi yang efektif (Agustini & Mulyani, 2025).

Dalam konteks Lombok Timur, di mana sebagian besar pemasok pangan adalah petani kecil dan UMKM lokal, keputusan tentang bagaimana rantai pasok dikelola siapa yang dikontrak, bagaimana mekanisme harga ditetapkan, seberapa formal perjanjian kemitraan akan sangat menentukan apakah program ini benar-benar berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal atau hanya mengalirkan anggaran tanpa transformasi struktural. Keberhasilan pengelolaan rantai pasok pangan lokal sangat ditentukan oleh koordinasi antar-aktor, mulai dari petani, koperasi, UMKM pengolah pangan, distributor, hingga pemerintah daerah. (Sukmasari *et al.*, 2025) menekankan bahwa optimalisasi rantai pasok dalam program makanan bergizi memerlukan sistem perencanaan kebutuhan berbasis data, jaminan kualitas bahan baku, serta kontrak pembelian yang stabil untuk menjaga keberlanjutan pasokan. Selain itu, (Rahim *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa keberlanjutan rantai pasok pangan lokal sangat bergantung pada kemitraan multi-aktor dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi distribusi, penguatan kelembagaan petani, serta pengawasan mutu pangan. Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan karakteristik agraris dan potensi pangan lokal yang cukup beragam. Meskipun demikian,

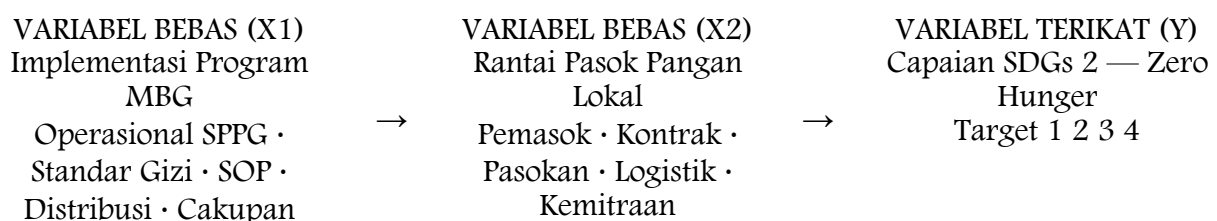
pemanfaatan sumber pangan lokal dalam program-program pangan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi kelembagaan, kapasitas pelaku lokal, serta sistem distribusi yang belum terintegrasi. Studi-studi kualitatif menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kebijakan pangan dan praktik implementasi di tingkat daerah, yang berdampak pada efektivitas program dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan perbaikan gizi (Mojopuro & Jatiroto, 2025). Kondisi ini menjadikan Lombok Timur sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan MBG secara kontekstual.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan rantai pasok untuk dalam mendukung dan menjalankan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2 yang berfokus pada tanpa kelaparan. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pelaksana program, pelaku usaha lokal, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu, efektivitas pengelolaan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor penting dalam menjamin ketersediaan, kualitas dan keberlanjutan bahan pangan yang digunakan dalam program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi program MBG dalam meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) di tingkat daerah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis pola implementasi program MBG di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan perspektif pengelola SPPG dan mitra dapur; (2) rantai pasok pangan lokal, termasuk mekanisme kemitraan, pola kontrak, dan tantangan yang dihadapi pemasok; (3) mengevaluasi dampak program terhadap penerima manfaat dalam dimensi gizi, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga; serta (4) menganalisis kontribusi dan peluang penguatan program MBG dalam mendukung pencapaian SDGs 2 di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengelolaan rantai pasok pangan lokal dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 2 di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menggali makna, proses, dan dinamika yang melingkupi implementasi program MBG dari perspektif langsung para pelakunya sesuatu yang tidak dapat ditangkap secara memadai oleh instrumen kuantitatif saja (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, kontradiksi, dan kompleksitas yang khas dari implementasi kebijakan publik di lapangan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas tiga komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, Variabel Bebas X1 (Implementasi Program MBG) menggambarkan dimensi operasional program yang dijalankan oleh SPPG sebagai ujung tombak layanan. Variabel ini diukur melalui kapasitas produksi, standar gizi, kepatuhan SOP keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan cakupan penerima manfaat. Kedua, Variabel Bebas X2 (Rantai Pasok Pangan Lokal) merepresentasikan ekosistem pengadaan yang menghubungkan produsen lokal dengan SPPG. Variabel ini diukur melalui jenis dan kapasitas pemasok, mekanisme kontrak kemitraan, stabilitas harga dan pasokan, serta kelancaran logistik. Ketiga, Variabel Terikat Y (Capaian SDGs 2)

merupakan outcome yang diukur melalui empat target: akses pangan (1), penurunan malnutrisi/stunting (2), pemberdayaan petani/UMKM (3), dan keberlanjutan sistem pangan (4).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berfokus pada satu SPPG yang beroperasi aktif beserta jaringan mitra dapur, pemasok, dan sekolah/posyandu yang terhubung dengannya. Pemilihan lokasi didasarkan pada tiga pertimbangan utama: (1) Lombok Timur merupakan salah satu daerah prioritas program MBG di NTB dengan beban stunting yang tinggi; (2) terdapat SPPG yang sudah beroperasi secara penuh dan dapat dijadikan unit analisis; dan (3) Kabupaten ini memiliki keragaman aktor rantai pasok dari petani sayuran, pemasok daging, hingga produsen tempe yang representatif untuk studi ekosistem pangan lokal.

Informan penelitian di tentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling dengan memilih pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan rantai pasok pangan lokal, seperti SPPG, mitra dapur, supplier, siswa, guru dan orang tua siswa. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan peran para aktor, bentuk kerja sama yang terjalin, serta berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan dari informan mengenai efektivitas program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program MBG

Temuan pertama yang menonjol dari wawancara dengan kelompok pengelola SPPG adalah kelengkapan struktur organisasi yang telah terbentuk sejak awal operasional. SPPG yang menjadi objek penelitian ini mengelola 49 orang tenaga kerja yang terbagi dalam delapan peran fungsional: 1 kepala SPPG, 1 akuntan, 1 ahli gizi, 1 asisten lapangan (aslap), 1 admin, 6 orang tim persiapan bahan, 10 orang tim memasak, 10 orang tim packing, 14 orang tim cuci alat makan, dan 4 driver distribusi. Struktur ini mencerminkan pendekatan yang cukup profesional dalam pengelolaan operasional dapur berskala industri kecil-menengah. Yang menarik dari profil SDM ini adalah keberagaman latar belakang pendidikan: Kepala SPPG berlatar S1 Pertanian, ahli gizi berlatar D3 Gizi, sementara admin berlatar SMA. Keberagaman ini di satu sisi mencerminkan aksesibilitas program sebagai penyedia lapangan kerja bagi berbagai tingkat pendidikan, namun di sisi lain menuntut sistem pendampingan dan pelatihan yang terstandar agar kualitas produksi dan pengelolaan tetap terjaga. Kepala SPPG H1 (30 tahun) mengonfirmasi bahwa pengelolaan dapur telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN, mencakup enam tahap utama: SOP operasional SPPG meliputi: (1) penerimaan dan pemeriksaan bahan baku; (2) persiapan dan sortir bahan; (3) proses memasak; (4) packing; (5) distribusi ke penerima manfaat; dan (6) pencucian alat makan (omprenge). Seluruh tahap ini diawasi oleh ahli gizi untuk memastikan tidak ada kontaminasi fisik seperti rambut, batu, atau plastik yang lolos dalam produk akhir.

Standar gizi yang diterapkan SPPG Lombok Timur disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat. Ahli gizi SPPG H2 (24 tahun, D3 Gizi), menjelaskan bahwa kalori per porsi dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan: TK hingga kelas 3 SD mendapatkan porsi 300–400 kkal, kelas 4 SD hingga SMP mendapatkan 500–600 kkal, sementara SMA serta ibu hamil dan ibu menyusui (bumil/busui) mendapatkan 700–800 kkal. Diferensiasi kalori ini selaras dengan panduan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes 2019 yang menetapkan kebutuhan energi berbeda berdasarkan kelompok usia dan kondisi fisiologis. Protokol keamanan pangan yang diterapkan melibatkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap bagi seluruh tenaga produksi, mencakup hairnet, masker, celemek, sarung tangan, dan sandal khusus dapur. Seluruh pekerja diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengenakan APD. Bahan baku yang datang melewati proses pemeriksaan kualitas dan dipisahkan antara gudang basah dan gudang kering. Penerapan standar ini secara konseptual sejalan dengan prinsip *Hazard Analysis Critical*

Control Points (HACCP) yang merupakan standar keamanan pangan internasional, meskipun sertifikasi formal HACCP untuk SPPG belum tercatat dalam penelitian ini sebagai persyaratan yang dipenuhi.

Salah satu aspek yang menarik dari operasional SPPG Atsania Pengadangan Lombok Timur adalah jadwal produksi yang dimulai larut malam. Proses memasak dimulai antara pukul 22.00–23.00, dengan urutan produksi yang logis: nasi dimasak terlebih dahulu karena memerlukan waktu terlalu lama, diikuti lauk-pauk, dan sayuran sebagai yang terakhir untuk menjaga kesegaran dan nilai gizinya. Setelah memasak selesai, tim packing menyiapkan buah (termasuk pemotongan buah), kemudian melakukan pemorsian dan pengemasan. Distribusi dimulai pukul 07.00, memprioritaskan pengiriman ke sekolah-sekolah terlebih dahulu. Setelah sekolah selesai dilayani, sekitar pukul 11.00 distribusi dilanjutkan ke posyandu, dengan titik distribusi terakhir dijangkau sekitar pukul 12.00. Setelah penyajian, alat makan (ompeng) dikumpulkan kembali oleh driver untuk dibawa ke SPPG guna dicuci dan disimpan untuk digunakan keesokan harinya. Sistem loop tertutup ini cukup efisien dari sisi penggunaan alat makan, meskipun menambah beban operasional driver.

Kapasitas produksi harian SPPG Atsania Pengadangan tercatat sebesar 2.622 porsi dengan kapasitas maksimal yang dapat dicapai hingga 3.000 porsi per hari. Angka ini menempatkan SPPG dalam kategori dapur komunal skala menengah yang cukup signifikan. Seluruh informan kelompok SPPG menyatakan bahwa distribusi selalu berlangsung tepat waktu, meskipun mereka juga mengakui adanya dua kendala utama dalam distribusi: kondisi jalan yang rusak di beberapa wilayah dan faktor cuaca terutama pada musim hujan ketika jalan berlumpur dan beberapa jalur menjadi tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Mitra dapur berperan sebagai pengelola fasilitas dan sumber daya produksi yang bekerja sama dengan SPPG dalam menjalankan operasional program MBG. Informan dalam penelitian ini adalah MD1 (39 tahun, S1), seorang mitra dapur yang telah terlibat dalam pelaksanaan program sejak awal. Berdasarkan pernyataannya, program MBG dipahami sebagai instrumen kebijakan yang secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat sekaligus menekan angka stunting dan kelaparan.

"Program MBG bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat dan mengurangi tingkat stunting serta kelaparan." (MD1, Mitra Dapur 2026)

Pemahaman mitra dapur terhadap tujuan program mencerminkan keselarasan antara kebijakan di tingkat pusat dengan persepsi aktor di tingkat lapangan. Ini penting karena, sebagaimana diungkapkan oleh dalam kerangka implementasi kebijakan, efektivitas suatu program sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana di level bawah memahami dan menerima tujuan kebijakan yang diemban. Ketika mitra dapur memiliki kesadaran yang jelas tentang fungsi sosial program, maka motivasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas cenderung lebih kuat.

Dari sisi kelembagaan, mitra dapur menyatakan bahwa fasilitas dan peralatan dapur telah memenuhi standar operasional yang dipersyaratkan, dengan dukungan SDM yang memiliki pembagian tugas yang jelas. Aspek pembiayaan operasional bersumber dari pemerintah pusat dan daerah secara terpadu, sehingga keberlanjutan operasional dapur tidak semata-mata bergantung pada sumber daya lokal. Yang patut diapresiasi adalah keberadaan sistem kontrak atau perjanjian formal dalam pengadaan bahan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun tidak bersifat informal semata, melainkan sudah terstruktur dalam kerangka legal yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Namun, seperti yang akan dibahas pada bagian pemasok, penerapan sistem kontrak ternyata tidak konsisten di antara seluruh mitra pemasok, sehingga aspek formalisasi kemitraan ini masih perlu diperk

Pengelolaan Rantai Pasok Pangan Lokal

Tiga pemasok yang menjadi informan dalam penelitian ini mewakili komoditas yang berbeda: daging ayam (P1, 23 tahun), tempe (P2, 29 tahun), dan sayuran segar (P3, 49 tahun). Ketiganya merupakan pelaku usaha yang relatif baru terlibat dalam program MBG belum mencapai satu tahun yang mencerminkan bahwa ekosistem rantai pasok program ini masih dalam tahap formasi.

Yang secara akademis menarik adalah perbedaan mendasar dalam struktur kesepakatan kemitraan antara ketiga pemasok tersebut. Pemasok daging ayam (P1) menyatakan memiliki perjanjian tertulis formal dengan SPPG, sementara pemasok tempe (P2) dan pemasok sayuran (P3) mengaku tidak memiliki perjanjian tertulis kesepakatan mereka bersifat informal dan verbal. Dualitas ini memiliki implikasi kelembagaan yang serius: ketidakhadiran kontrak tertulis pada sebagian rantai pasok menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan posisi tawar pemasok dan mengurangi prediktabilitas pasokan bagi SPPG.

Dari sisi kapasitas pasokan, terdapat variasi yang lebar: pemasok daging ayam mampu menyediakan hingga 2.000 kg per hari, pemasok tempe sanggup memasok hingga 300 kg (3 kuintal) per hari, sementara pemasok sayuran memiliki kapasitas 50 kg per hari. Seluruh pemasok menyatakan bahwa pengiriman dilakukan oleh mereka sendiri (self-delivery) dan selalu tepat waktu. Semua pemasok juga mengkonfirmasi bahwa keterlibatan dalam program MBG memberikan dampak positif pada pendapatan usaha mereka sebuah sinyal awal yang menggembirakan mengenai potensi pemberdayaan ekonomi lokal.

Isu harga bahan baku menjadi salah satu titik ketegangan paling menonjol dalam rantai pasok MBG Lombok Timur. Terdapat kontradiksi yang menarik dalam data: Kepala SPPG menyatakan bahwa harga bahan pangan sering berubah-ubah mengikuti harga pasar, sementara ahli gizi dan admin SPPG menyatakan harga relatif stabil. Kontradiksi ini kemungkinan mencerminkan perbedaan perspektif: dari sisi manajemen keuangan SPPG, fluktuasi harga memang terasa karena langsung memengaruhi perencanaan anggaran; sementara dari sisi operasional harian, fluktuasi tersebut masih dapat dikelola tanpa mengganggu jadwal distribusi.

Dari sisi pemasok, pemasok daging ayam (P1) juga mengakui bahwa harga yang disepakati mengikuti fluktuasi pasar dan pernah mengalami kesulitan memenuhi pesanan akibat kekurangan stok ayam dari kandang. Situasi ini mengungkap kelemahan struktural rantai pasok: ketergantungan pada satu atau sangat sedikit pemasok untuk komoditas kritis seperti protein hewani menciptakan risiko gangguan pasokan yang tidak tertangani dengan baik. Kasus pemasok tempe P2 juga mengungkap persoalan manajemen konfirmasi pesanan: karena tempe memerlukan proses fermentasi 2–3 hari, SPPG idealnya melakukan pemesanan H-3, namun kenyataannya konfirmasi sering terlambat menciptakan tekanan produksi yang signifikan.

"Kendalanya jika dapur tidak konfirmasi pemesanan lebih cepat karena produk tempe ini jadi 2 sampai 3 hari, jadi dapur seharusnya memesan H-3 hari." (P2, Pemasok Tempe 2026).

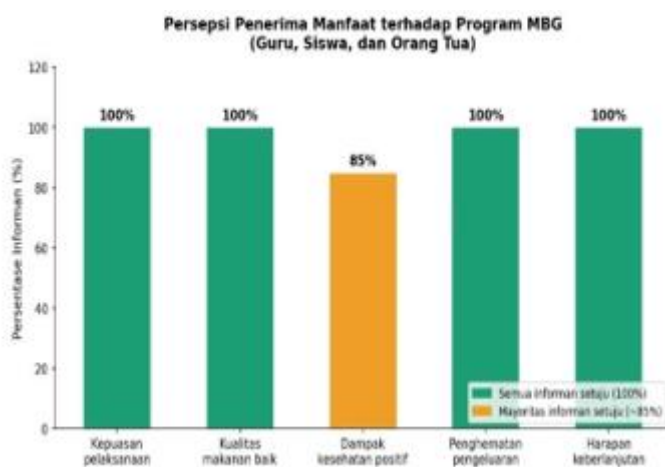
Persoalan keterlambatan konfirmasi pesanan ini bukan sekadar masalah koordinasi teknis ia mencerminkan belum matangnya sistem manajemen rantai pasok SPPG yang mampu mengantisipasi kebutuhan jangka pendek secara terencana. Dalam literatur manajemen rantai pasok, fenomena ini dikenal sebagai bullwhip effect dalam skala mikro: ketidakpastian informasi di titik hilir rantai menciptakan ketidakstabilan produksi yang tidak proporsional di titik hulu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, seluruh pemasok menyatakan harapan yang kuat agar program MBG berlanjut. Mereka melihat program ini sebagai pasar yang lebih pasti dan lebih menguntungkan dibandingkan mengandalkan pasar tradisional yang sangat volatile. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat aspirasi yang signifikan tentang perbaikan tata kelola kemitraan.

"Semoga pengelola dapur lebih bijak dalam memanfaatkan dananya." (P1, Pemasok Daging Ayam 2026). "Harapannya semoga program ini tetap berlanjut namun program ini semoga lebih adil dan dapat menguntungkan banyak pihak." (P2, Pemasok Tempe 2026).

Ungkapan 'lebih bijak dalam memanfaatkan dana' dan 'lebih adil' dari para pemasok menandakan adanya ketidakpuasan terselubung yang perlu dibaca secara kritis. Ini bukan sekadar keluhan permukaan, melainkan sinyal tentang adanya ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rantai pasok di mana SPPG sebagai pembeli dominan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan pemasok individual. Ketidakseimbangan ini merupakan persoalan struktural yang

perlu ditangani secara sistematis melalui mekanisme kontrak yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan pemasok lokal skala kecil.

Dampak Program Mbg Pada Penerima Manfaat



Gambar 2. Persepsi Penerima Manfaat

Seluruh delapan informan kelompok penerima manfaat empat siswa SMP berusia 15 tahun, dua guru, dan dua orang tua siswa menyatakan kepuasan terhadap program MBG. Menu yang diterima secara konsisten terdiri dari nasi, lauk protein (daging ayam atau telur), sayuran, dan buah-buahan, dengan frekuensi penerimaan enam kali per minggu (Senin hingga Sabtu). Seluruh informan menyatakan bahwa porsi makanan cukup, kebersihan terjaga, dan tampilan makanan layak untuk dikonsumsi. Hal ini dikonfirmasi dari sisi SPPG oleh Kepala SPPG yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada satu pun penerima manfaat yang mengajukan penolakan. SPPG juga menerapkan mekanisme umpan balik melalui formulir jadwal adaptif yang memungkinkan penerima manfaat memberikan nilai dan saran terhadap menu yang diterima sebuah mekanisme partisipasi yang sederhana namun penting untuk peningkatan berkelanjutan.

Dalam dimensi kesehatan dan kognitif, respons informan bervariasi antara yang merasakan perubahan signifikan dan yang belum merasakan perbedaan nyata. Sebagian besar siswa melaporkan dampak positif yang mereka rasakan sendiri:

"Setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG, saya merasa lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih semangat saat beraktivitas. Tapi kadang saya mengantuk setelah makan MBG." (PM4, Siswa SMP, 2026). *"Saya merasa lumayan mudah berpikir karena memakan sayur."* (PM3, Siswa SMP, 2026)

Namun terdapat nuansa yang perlu dicermati. Dua informan seorang guru (PM2) dan seorang orang tua siswa (PM8) menyatakan bahwa belum ada perubahan yang signifikan dari segi kesehatan dan semangat belajar yang dapat mereka amati secara objektif. Perbedaan persepsi ini bukan berarti program tidak efektif, melainkan mencerminkan kenyataan bahwa dampak gizi yang terukur secara klinis terutama perubahan status antropometri memerlukan waktu yang lebih panjang dari sekadar beberapa bulan program berjalan. Dalam literatur gizi, perubahan parameter seperti tinggi badan dan indeks massa tubuh secara statistik baru dapat dideteksi setelah minimal 6–12 bulan intervensi gizi yang konsisten. Salah satu dampak yang paling konsisten dirasakan oleh penerima manfaat adalah berkurangnya pengeluaran untuk pangan, yang memungkinkan realokasinya untuk kebutuhan lain. Seluruh informan penerima manfaat menyatakan bahwa program MBG membantu mengurangi pengeluaran keluarga untuk makanan. Bagi siswa, manfaat ini dirasakan dalam bentuk yang unik yakni kemampuan menabung:

"Lanjut, karena dari MBG banyak siswa yang bisa menabung." (PM3, Siswa SMP 2026)
"Berlanjut karena MBG juga membantu saya menabung." (PM4, Siswa SMP 2026)

Pernyataan siswa tentang kemampuan menabung ini mengungkap dimensi dampak yang tidak selalu diperhitungkan dalam desain program: program MBG secara tidak langsung memberikan 'uang jajan pengganti' bagi siswa yang sebelumnya sebagian besar uang jajannya dialokasikan untuk membeli makanan di sekolah. Dengan makan siang yang terjamin dari program, mereka dapat menyimpan uang saku untuk keperluan lain. Ini merupakan contoh dari efek kesejahteraan tidak langsung yang bernilai penting, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Orang tua siswa memberikan perspektif yang lebih strategis tentang kebutuhan perbaikan program:

"Libatkan UMKM lokal jadi penyedia biar merata dan muter ekonomi warga. Menu divariasikan dan rasanya enak biar tidak dibuang." (PM7, Orang Tua Siswa, 35 tahun, 2026). *"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih optimal, merata, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, fokus utamanya harus pada pemberdayaan ekonomi lokal, standarisasi gizi berbasis kearifan wilayah, pengawasan mutu ketat, serta akurasi data penerima manfaat."* (PM8, Orang Tua Siswa, 30 tahun, 2026)

Dua saran dari orang tua siswa ini secara tidak sengaja merumuskan agenda kebijakan yang sangat komprehensif: keterlibatan UMKM lokal yang lebih luas, perputaran ekonomi warga, variasi menu berbasis kearifan lokal, pengawasan mutu, dan akurasi data penerima. Kemampuan masyarakat awam untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip akademis tentang keberlanjutan program menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya kewajiban demokratis, tetapi sumber pengetahuan kebijakan yang berharga.

Kontribusi Program Mbg Terhadap SDGs 2 Di Lombok Timur

Kontribusi program MBG terhadap Target 1 SDGs akses universal pangan aman dan bergizi sudah mulai terlihat secara nyata di Lombok Timur. Dengan 2.622 porsi makanan bergizi yang terdistribusi setiap hari ke sekolah dan posyandu, program ini secara langsung memperluas akses pangan bergizi bagi populasi yang sebelumnya tidak terjamin asupan gizinya selama jam sekolah. Bagi sebagian besar siswa dari keluarga kurang mampu di pedesaan Lombok Timur, program ini bahkan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk mengonsumsi protein hewani (ayam atau telur) secara rutin. Distribusi ke posyandu yang melayani ibu hamil dan balita memperluas cakupan intervensi ke kelompok rentan yang justru paling kritis dari sudut pandang gizi karena periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah jendela kesempatan terpenting untuk mencegah stunting secara permanen. Dengan mengintegrasikan layanan gizi posyandu ke dalam ekosistem SPPG, program MBG di Lombok Timur menunjukkan potensinya sebagai instrumen pencegahan stunting yang lebih komprehensif dari program-program sebelumnya.

Dampak program terhadap Target 2 SDGs pengurangan semua bentuk malnutrisi masih memerlukan evaluasi jangka menengah yang lebih sistematis. Seperti telah dibahas, perubahan status gizi yang terukur secara klinis memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun, indikator proxy yang tersedia dari wawancara sudah cukup menjanjikan: sebagian besar penerima manfaat melaporkan peningkatan kesehatan dan vitalitas, serta tidak ada laporan kejadian keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG mengindikasikan standar keamanan pangan yang cukup terjaga. Satu catatan penting adalah perlunya sistem pemantauan pertumbuhan yang terintegrasi dengan data antropometri penerima manfaat. Saat ini, data antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas) belum secara sistematis dikumpulkan sebagai bagian dari monitoring program MBG di Lombok Timur, padahal data inilah yang akan menjadi bukti kuantitatif paling kuat mengenai dampak program terhadap Target 2 Tanpa sistem pemantauan ini, klaim dampak program terhadap malnutrisi hanya dapat bersifat anekdot dan sulit diverifikasi secara ilmiah.

Target 3 SDGs yang berfokus pada peningkatan pendapatan produsen pangan skala kecil mendapatkan respons yang paling nyata dari program MBG melalui keterlibatan supplier lokal. Seluruh pemasok yang diwawancarai menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam program MBG meningkatkan pendapatan usaha meskipun peningkatan tersebut belum dikuantifikasi secara

spesifik dalam penelitian ini. Namun terdapat persoalan inklusi yang perlu dicermati lebih dalam: dari tiga pemasok yang berhasil terlibat, hanya satu (pemasok daging ayam) yang memiliki kontrak formal, sementara dua lainnya beroperasi secara informal. Ketiadaan kontrak formal bagi pemasok sayuran dan tempe menciptakan ketidakpastian jangka panjang yang berpotensi menghambat investasi mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi. Petani sayuran Ari Kencana (49 tahun, lulusan SD) adalah gambaran nyata dari pemasok yang memiliki kapasitas produksi terbatas (50 kg/hari) tetapi berpotensi untuk ditingkatkan jika mendapatkan dukungan teknis dan kepastian kontrak yang lebih baik.

Kontribusi program MBG terhadap Target 4 keberlanjutan sistem produksi pangan masih berada pada tahap yang paling awal. Belum ditemukan bukti bahwa program ini secara langsung mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan di kalangan pemasoknya. Namun terdapat beberapa inisiatif positif yang layak dicatat: penggunaan alat makan (omprenge) yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali sebagai lawan dari kemasan sekali pakai menunjukkan kesadaran tentang pengurangan limbah, meskipun mungkin juga didorong oleh pertimbangan ekonomis. Saran dari orang tua siswa Zamira tentang perlunya 'standarisasi gizi berbasis kearifan wilayah' membuka peluang menarik untuk mengintegrasikan kearifan pangan lokal NTB seperti penggunaan sorgum, jagung lokal, atau hasil laut dalam menu MBG. Diversifikasi menu berbasis sumber pangan lokal tidak hanya akan meningkatkan ketahanan pangan daerah, tetapi juga mendukung pelestarian biodiversitas pangan lokal yang merupakan bagian penting dari Target 4.

Secara kritis, penelitian ini menemukan bahwa program MBG di Lombok Timur berada pada persimpangan yang krusial: antara potensi besar yang dimilikinya dan berbagai keterbatasan yang melingkupinya. Pada sisi positif, SPPG telah berhasil membangun struktur operasional yang fungsional, mempertahankan jadwal distribusi yang tepat waktu, dan menciptakan dampak nyata yang dirasakan penerima manfaat. Ini bukan pencapaian kecil membangun sistem katering komunal untuk ribuan orang setiap hari adalah tantangan logistik yang serius, dan fakta bahwa ia berjalan dengan relatif lancar dalam bulan-bulan pertama operasi patut diapresiasi.

Namun pada sisi lain, sejumlah kelemahan struktural memerlukan perhatian serius. Dualisme pola kontrak di mana sebagian pemasok diformalkan dan sebagian tidak menciptakan ekosistem rantai pasok yang rapuh dan tidak adil. Ketiadaan sistem pemantauan dampak berbasis data antropometri melemahkan kemampuan program untuk membuktikan kontribusinya terhadap SDGs 2 secara kuantitatif. Dan dominasi protein hewani pabrikan (ayam potong) dalam menu, tanpa diversifikasi yang bermakna ke hasil pertanian lokal NTB, berarti program ini belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal yang menjadi salah satu justifikasi utamanya. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah program MBG hanya akan menjadi program pemberian makan yang efisien yang berhenti ketika anggaran habis atau prioritas politik berubah atau akan bertransformasi menjadi katalis perubahan sistem pangan yang lebih fundamental? Jawabannya sangat bergantung pada keputusan kebijakan yang diambil sekarang, dalam fase formatif program, sebelum pola-pola yang tidak optimal mengakar dan menjadi sulit diubah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil menggambarkan secara mendalam dan multidimensional implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur, dengan fokus pada pengelolaan rantai pasok pangan lokal dan kontribusinya terhadap SDGs 2. Dari analisis data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 16 informan dari empat kelompok berbeda, setidaknya empat kesimpulan utama dapat dirumuskan. Pertama, secara operasional SPPG telah berhasil membangun sistem produksi dan distribusi makanan bergizi yang terstruktur, terstandar, dan fungsional. Dengan kapasitas produksi 2.622 porsi per hari, SOP yang mencakup enam tahapan dari penerimaan bahan baku hingga pencucian alat, serta distribusi tepat waktu ke sekolah dan posyandu, SPPG di Lombok Timur menunjukkan kematangan operasional yang cukup menggembirakan di tahap awal implementasi. Kedua, rantai pasok pangan lokal yang mendukung program MBG di Lombok Timur ditandai oleh dualitas kelembagaan: sebagian pemasok memiliki perjanjian tertulis formal, sebagian lain beroperasi atas dasar kesepakatan

informal. Dualitas ini, bersama dengan ketidakstabilan harga bahan baku, masalah keterlambatan konfirmasi pesanan untuk komoditas olahan, dan keterbatasan kapasitas individual beberapa pemasok, merupakan kelemahan struktural yang perlu diselesaikan secara sistematis.

Ketiga, dampak program terhadap penerima manfaat terbukti nyata dan multidimensional: peningkatan akses pangan bergizi, perbaikan kesehatan dan semangat belajar yang dilaporkan mayoritas informan, serta dampak ekonomi berupa berkurangnya pengeluaran pangan keluarga dan peningkatan kemampuan menabung siswa. Meskipun dampak klinis terhadap status gizi memerlukan evaluasi jangka menengah yang lebih sistematis, indikator proxy yang tersedia cukup menjanjikan. Keempat, kontribusi program MBG terhadap SDGs 2 di Lombok Timur bersifat nyata namun belum merata di semua target. Kontribusi terhadap Target 1 (akses pangan) sudah terbukti, kontribusi terhadap Target 2 (pemberdayaan petani) sudah dimulai meskipun masih terbatas dan belum merata, sementara kontribusi terhadap Target 3 (pengurangan malnutrisi) dan Target 4 (keberlanjutan sistem pangan) memerlukan penguatan intervensi tambahan dan horizon waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat dampak program MBG di Lombok Timur dan mendorong kontribusinya yang lebih substansial terhadap SDGs 2. Kepada Badan Gizi Nasional (BGN), penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan regulasi nasional yang mewajibkan persentase minimum sekurang-kurangnya 30% pengadaan bahan baku MBG dari UMKM dan petani lokal (2) pemberlakuan standar kontrak kemitraan tertulis yang wajib diterapkan oleh seluruh SPPG kepada setiap pemasoknya, dilengkapi klausul perlindungan bagi pemasok skala kecil (3) pengembangan sistem monitoring dampak yang wajib mencakup pengukuran antropometri penerima manfaat secara berkala dan (4) program pelatihan berkelanjutan bagi pengelola SPPG dalam bidang manajemen rantai pasok pangan, keamanan pangan, dan literasi keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola SPPG, mitra dapur, pemasok lokal, serta para penerima manfaat di Kabupaten Lombok Timur yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pengumpulan data hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia Effectiveness And Challenges Of Free Nutritious Meal Program Policy As An Educational. 4, 362–368.
- Fao, Ifad, Unicef, Wfp, & Who. (2024). The State Of Food Security And Nutrition In The World 2024: Financing To End Hunger, Food Insecurity And Malnutrition In All Its Forms. Food And Agriculture Organization Of The United Nations. <https://doi.org/10.4060/cd1254en>
- Indonesia, K. S. N. R. (2025). Presiden Prabowo Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dorong_percepatan_program_makan_bergizi_gratis_di_indonesia
- Indonesia, M. P. R. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Harus Berdampak Luas Bagi Masyarakat. <https://www.mpr.go.id/berita/program-makan-bergizi-gratis-harus-berdampak-luas-bagi-masyarakat>
- Mojopuro, D. I. D., & Jatiroto, K. (2025). Peran Industri Tahu Lokal Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis. 3(11).
- Nations, F. And A. O. Of The U. (2026). Fao Sustainable Development Goals Helpdesk. In Fao Sustainable Development Goals Helpdesk. <https://www.fao.org/sustainable-development-goals-helpdesk/en>
- Nations, U. (2026). Goal 2: Zero Hunger (Sustainable Development Goal 2). In United Nations Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals/goal2>

- Rahakbauw, I. K. (2025). Analisis Tantangan Dan Strategi Ketahanan Pangan Di Indonesia. 18(1).
- Rahim, H., Muhammad, S., & Nurlela, A. (2025). Sustainability Of The Free Nutritional Meal Program (Mbg): An Analysis Of The Effectiveness Of The Quadruple Helix Model. 14(4), 725–733. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V14i4.16036>
- Sukmasari, D., Aritonang, S., Sudiarso, A., & Pujiyanto, K. (2025). Optimization Of Free Nutritious Meal Supply Chain Program In Support Of Indonesia ' S Non-Military Defense Force. 6(3), 2202–2209.
- Sulistiani, T., Dewi, H., Fitriani, A., & Hartati, M. S. (2026). National Policies For Child Nutrition Security And Their Impact On Learning Outcomes. 4(1), 35–46.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review Of The Free Nutritious Meal (Mbg) Program. 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/Jisdep.V6i2.798>
- Syamsu, R. F., Putry, R. A., & Widyadhana, N. M. (2025). Tinjauan Nilai Gizi Dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) PRESIDEN RI. 6, 14843–14853.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
- Indonesia, S. K. R. (2026). Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Jawaban Negara atas Masalah Gizi Anak. <https://setkab.go.id/prabowo-tegaskan-program-makan-bergizi-gratis/>
- WFP. (2022). State of School Feeding Worldwide 2022. Rome: World Food Programme. <https://doi.org/10.4060/cc3540en>